**ABSTRAK**

Tesis yang berjudul “Politik Hukum Klausula Eksonerasi Pada Jasa Perhotelan Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” membahas bagaimana politik hukum klausula eksonerasi, khususnya pada pada jasa perhotelan. Hal ini lah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis tesis ini dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kedudukan konsumen dalam kerangka penerapan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa perhotelan dalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagaimana penerapan klausula eksonerasi antara pelaku usaha hotel dengan konsumen dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen, bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa perhotelan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk melakukan suatu perbuatan yang pantas. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.

Kedudukan konsumen dalam kerangka penerapan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa perhotelan dalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah kedudukan yang tidak seimbang karena bertentengan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjunjung kesetaran kedudukan antara keduanya.Penerapan klausula eksonerasi antara pelaku usaha hotel dengan konsumen dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen, maka apabila terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa perhotelan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci :Politik Hukum, Jasa Perhotelan, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The position of the consumer in the sense of the application of exoneration clauses conducted by hoteliers in the implementation of hotel practices with the practice of hotel implementation with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is an unbalanced position because it is powered by the Consumer Protection Act, The intermediary between the two. The application of the exoneration clause between the hotel business actor and the consumer relating to Law Number 8 Year 1999 concerning the Consumer and Political Protection of the Official Law by the Law of Consumer and Political Protection, as the exoneration clause in the agreement, the agreement is null and void . Legal action which can be done with the implementation of exoneration clause in agreement made by hotel service business actor with Act No. 8 of 1999 concerning Consumers Protection that every disadvantaged consumer can sue business actor through Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) In the general judicial environment, on the basis of the voluntary choice of the parties to the dispute.

Keywords: Political Law, Hospitality Services, Exponential Clauses, Consumer Protection